

BAB II

Studi Pustaka dan Tinjauan Literatur

2.1 Review Teori

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan landasan dari beberapa teori yang sesuai dengan tujuan penelitian, yang diyakini mampu menjawab pertanyaan dari penelitian yang dilakukan, beberapa teori yang Penulis gunakan akan dijelaskan seperti dibawah ini.

2.1.1 Teori Politik Hijau

Teori Politik Hijau atau yang sering kali disebut *Green Theory* merupakan disiplin ilmu yang memiliki prinsip dasar ekosentrisme dan pembatasan pertumbuhan. Ekosentrisme sendiri adalah pandangan yang mengkaitkan hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan hidup. Pada ekosentrisme, titik berat yang diutamakan adalah kondisi preservasi alam. Menurut Altur Gunar, Teori Hijau dalam Hubungan Internasional melihat bahwa struktur ekonomi global serta kapitalisme menjadi benang merah utama permasalahan lingkungan yang terus terjadi. Negara cenderung akan lebih mengedepankan kepentingan perkembangan ekonominya dan mengabaikan degradasi lingkungan yang terjadi seiring dengan perkembangan yang berlanjut.¹⁴ Teori lingkungan menggunakan istilah *environmental security* untuk secara eksplisit menganalisis hubungan antara keamanan dan politik lingkungan global.

¹⁴ Gunar, Altur. *Critical Approaches to International Relations*. United Kingdom: Brill. 2021, hal 240

Penstudi ilmu Teori Lingkungan Kritis seringkali menganggap bahwa dunia menggunakan praktik lingkungan eksploitatif di mana perkembangan ekonomi menyebabkan masalah global, dan degradasi lingkungan tersebut berakibat fatal bagi sebagian orang dan negara yang terjadi karena globalisasi dan ketidaksetaraan. *Environmentalist* berargumen bahwa kapitalisme dan praktiknya merupakan sumber utama dari degradasi lingkungan oleh karena itu beban utama terkait masalah lingkungan global akan diarahkan kepada negara-negara adidaya yang telah jauh lebih lama mengkonsumsi sumber daya alamnya maupun sumber daya negeri lain melalui kolonialisme dalam praktik industrialisme serta institusi-institusi modern yang dianggap sebagai kaki tangan kapitalisme itu sendiri seperti World Bank, IMF, dan WTO. Penataan kembali struktur global ekonomi yang berpusar kepada lingkungan hidup serta pelestariannya merupakan tuntutan utama yang disampaikan dalam Teori Politik Hijau.¹⁵

Teori politik Hijau muncul sebagai kekuatan politik yang penting di banyak negara sejak 1970, sejak awal *standing position* dari teori politik global itu sendiri cenderung berlingkup global. Seiring dengan makin maraknya krisis lingkungan membuat politik hijau terus meningkat relevansinya. Meski kebanyakan penstudi Teori Politik Hijau menolak globalisasi dan neoliberalisme ekonomi dan memilih untuk mengembalikan otonomi lokal dan komunitas masyarakat adat demi pembatasan konsumsi dan perkembangan ekonomi untuk menghindari efek terburuk dari degradasi lingkungan. Berbagai variasi dari aplikasi *Green Theory* dapat ditemukan di berbagai kalangan aktor negara

¹⁵ Ibid, hal 236

maupun non-negara. Politik hijau muncul dikarenakan adanya pengetahuan dan kewaspadaan manusia akan pentingnya lingkungan dan hubungan antara umat manusia dan alam di sekitarnya. Dalam dinamika Teori Hubungan Internasional, teori politik hijau merupakan perspektif alternatif Hubungan Internasional yang mengkritisi perspektif tradisional ketika menghadapi isu-isu spesifik seperti isu lingkungan hidup, yang erat berkaitan dengan isu kemiskinan, kelaparan, akses kesehatan, bahkan belakangan ini UNFCCC mencoba untuk menambahkan isu perempuan dan peperangan yang disebabkan oleh minimnya sumber daya alam yang ada. Isu-isu kosmopolitan yang diangkat oleh perspektif alternatif seperti teori politik hijau merupakan hal yang dianggap melanggar kedaulatan dan tidak terlalu diperhatikan oleh pandangan klasik atau tradisional.¹⁶ Nampaknya, ide bahwa manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam yang mempertimbangkan bahwa berbagai macam kehidupan adalah sesuatu yang berharga baik kehidupan manusia maupun spesies lainnya adalah ide yang radikal dan baru dan keluar dari norma-norma umum dalam perspektif Hubungan Internasional.

Terkait batas-batas pertumbuhan, politik hijau berpandangan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu bagi manusia untuk mengadakan perkembangan dan pertumbuhan. Politik hijau fokus kepada ekonomi politik dan ketidakadilan struktural. Hal ini dapat dilihat aplikasinya dalam prinsip utama UNFCCC yang diformalisasikan di Rio de Janeiro yang merupakan *Common but Differentiated Responsibilities* yang menyadari bahwa setiap negara meski memiliki tanggung

¹⁶ Ibid, 256

jawab yang sama untuk melindungi alam akan tetapi langkah pelestarian yang perlu ditempuh masing-masing negara berbeda-beda berdasarkan taraf perkembangan ekonomi dan sosialnya.¹⁷

Konflik lingkungan hidup terjadi karena interseksi antara ekologi dan kemasyarakatan di mana yang satu diatur dan dibatasi oleh sistem-sistem natural atau alam yang tidak dapat diganggu gugat, sementara yang lainnya diatur oleh nilai-nilai sosial dan politik yang dibentuk oleh kepentingan ekonomi dan perkembangan. Hal yang penting untuk dipahami adalah konflik lingkungan hidup biasanya merupakan masalah cara pengaturan ekosistem. Dalam upaya diplomasi resolusi masalah ini, terdapat tiga komponen utama dalam upaya diplomasi untuk menangani konflik lingkungan hidup, yang sesuai dengan tujuan perkembangan berkelanjutan: perlindungan lingkungan hidup, perkembangan ekonomi, dan keadilan sosial.¹⁸

Fokus utama politik hijau adalah ketidakadilan struktural yang melekat dalam tata politik internasional yang melekat dalam ekonomi kapitalis modern yang tentunya berkaitan dengan Teori Marxis. Selain itu, terdapat juga kritisi politik hijau terhadap negara. Politik hijau menganggap bahwa negara merupakan bagian dinamika masyarakat modern yang menyebabkan krisis lingkungan. Secara umum, teori politik hijau terfokus terhadap penciptaan keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah adanya perhatian krisis lingkungan yang tidak merata di dunia. Melalui telaahan lebih lanjut kepada wilayah-wilayah yang tidak memiliki

¹⁷ UNFCCC. "NAPAs in The Context of UNFCCC Process." Last modified September, 2002.

Accessed 24 Maret, 2023. https://unfccc.int/files/adaptation/napas/application/pdf/03_unfccc.pdf

¹⁸ James Speth, *Global Environmental Challenges: Transition to Sustainable World*, (India: Orient Blackswan, 2005), hlm. 37

kebutuhan sumber daya yang cukup untuk memenuhinya diharapkan menyadarkan manusia bahwa terdapat ketimpangan sumber daya bagi masyarakat lainnya. Tema dari *Green Theory* dalam hubungan internasional adalah slogan “*Think Globally, Act Locally*” yang menekankan bahwa masalah-masalah sosial ekonomi dan lingkungan global terjadi dalam skala yang melintasi batasan-batasan negara, isu-isu ini hanya bisa direspon dengan baik melalui tindakan lokal dan konstruksi komunitas politik yang berskala lebih kecil.¹⁹

Teori politik hijau di implementasikan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh badan pemerintahan untuk menjamin ide-ide ekosentrisme dapat disampaikan melalui kondisi politik nasional. Pada upaya perubahan iklim, teori politik hijau menjadi dasar-dasar utama yang membangun Konvensi Kerangka Kerja PBB terhadap perubahan iklim.

Teori politik hijau digunakan dalam tulisan ini sebagai dasar utama analisis yang menekankan kepentingan keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui teori politik hijau, penulis berharap bisa menggunakan asumsi mendasar ekosentrisme yang tersedia untuk meninjau kembali pentingnya aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan secara bersamaan oleh seluruh pihak dan bagaimana Kerajaan Maroko berperan dalam dinamika tersebut. Melalui Teori Politik Hijau, analisis terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Maroko dalam implementasi teknologi ramah lingkungan dapat dipahami lebih baik karena langkah tersebut beriringan dengan paham utama politik hijau yang

¹⁹ Gary Browning, *Understanding Contemporary Society (Theories and the Present)*, SAGE Publications, London, 2000, hlm 447

meminta negara untuk memikirkan kembali dampak proses ekonominya terhadap lingkungan hidup.

Sama seperti teori politik yang digunakan dalam pengambilan kebijakan lainnya, Teori Politik Hijau kontemporer merupakan hasil *trial and error* yang dilakukan seiring dengan semakin genting dan relevannya penggunaan teori dalam aktivitas negara dan di hubungan internasional. Berbagai masalah politik internasional saat ini dapat dikaitkan dengan masalah lingkungan oleh karena itu *Green Theory* digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami kebijakan yang diambil oleh para pembuat keputusan terutama dalam isu lingkungan terbesar di masa *Anthropocene* ini yaitu perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia.

Teori Politik Hijau diaplikasikan sebagai kerangka kerja untuk memahami kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kerajaan Maroko untuk mengurangi penggunaan teknologi konvensional seperti bahan bakar fosil sebagai upaya untuk pemusatan proses ekonomi yang menitikberatkan pelestarian lingkungan hidup. Tinjauan kembali terhadap kebijakan tersebut merupakan bagian penting dalam pengembangan kebijakan demi keberlanjutan dan kelestarian yang sesuai dengan mandat Persetujuan Paris untuk menekan pemanasan dalam batas 1.5 C. Teori politik hijau memberikan alternatif terhadap pemahaman politik klasik yang mementingkan perkembangan ekonomi. Melalui teori ini, pengertian terkait implementasi teknologi ramah lingkungan oleh Kerajaan Maroko dapat dipahami lebih lanjut.

2.1.2 Liberalisme Institutional

Kooperasi upaya lingkungan hidup global tidak dapat dipisahkan dari paham idealis liberalisme institusional yang pada dasarnya memahami bahwa perdamaian dapat dibentuk melalui pembentukan institusi yang berguna untuk menginisiasikan dan menjaga kooperasi antar masing-masing negara.²⁰ Teori ini membentuk kembali ketertarikan para penstudi hubungan internasional terhadap kapasitas dan potensi dari institusi-institusi internasional seperti PBB dalam kooperasi internasional jangka panjang dan perdamaian pasca Perang Dingin.

Liberalisme institusional berargumen bahwa dalam menjelaskan hubungan internasional, fokus yang harus ditekankan adalah fokus terhadap organisasi internasional dan *global governance*. Institusionalisme menekankan bahwa tujuan bersama memiliki peran penting dalam pembentukan sistem internasional yang membuat organisasi internasional dapat menjadi wadah di mana masing-masing negara dapat berkooperasi.²¹

Dalam konteks masalah lingkungan hidup internasional, hal ini berarti upaya yang dilakukan oleh institusi-institusi internasional dalam penanganan perubahan iklim dan stabilisasi kondisi lingkungan hidup global dianggap sebagai upaya bersama negara-negara untuk mencapai perdamaian dan kebaikan bersama. Secara umum terdapat dua jenis hukum internasional yang mengatur masalah lingkungan hidup yaitu 1) Konvensi yang mengatur penggunaan sumber daya

²⁰Mohammed Nuruzzaman. (2008). Liberal Institutionalism and International Cooperation after 11 September 2001. *International Studies*. 45. 193-213.

²¹ Rebecca Devitt, "Liberal Institutionalism: An Alternative to International Theory or Just Maintaining the Status Quo?" diakses pada 28 Februari 2023. <https://www.e-ir.info/2011/09/01/liberal-institutionalism-an-alternative-ir-theory-or-just-maintaining-the-status-quo/>

alam antar negara-negara. 2) Regulasi dari polusi. Berdasarkan kedua jenis tersebut, masalah utama yang timbul adalah bagaimana batasan-batasan politik yang ditentukan negara biasanya tidak merefleksikan batasan-batasan biologis yang ditentukan oleh alam. Ketika suatu negara mulai mengkonsumsi sumber daya alamnya dalam proses pengembangan ekonomi, mereka juga memproduksi polusi yang menyebabkan masalah lingkungan yang jauh melintasi batasan-batasan nasional suatu negara.

Institusionalisme sendiri berkembang dari ide yang disampaikan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye yang menyatakan bahwa dengan adanya interpedensi kompleks pada masing-masing negara. Lalu disambung oleh Ian Hurd yang menyatakan bahwa “dengan peningkatan ketergantungan antar negara, kepentingan organisasi internasional juga akan meningkat. Dapat dilihat bahwa organisasi internasional, baik dalam bentuk satu maupun yang lainnya, merupakan kunci utama dalam penanganan masalah-masalah ekonomi dan politik di abad ke-21.”²²

Berbasis kesadaran bahwa masing-masing wilayah secara umum memiliki kondisi lingkungan yang sama dan berada dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada tahap yang serupa, PBB menemukan bahwa inisiatif regional merupakan instrumen penting dalam membentuk kooperasi dalam penanganan perubahan iklim. Upaya ini termasuk upaya pencegahan bencana alam, kapasitas

²² Ian Hurd, *International Organization; Politics, Laws and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press 2017), hlm. 7.

tanggapan serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung diskusi yang masih berlanjut dan perkembangan mengenai mitigasi perubahan iklim.²³

Dalam lingkup liberalisme institusional, di mana negara-negara berkumpul bersama untuk mencapai suatu keputusan dalam mitigasi perubahan iklim, diplomasi yang dilakukan dalam level negosiasi tersebut adalah diplomasi lingkungan hidup. Di topik perubahan iklim, konflik lingkungan hidup yang dibahas adalah permasalahan antara prioritas proteksi lingkungan hidup dan prioritas perkembangan ekonomi yang merupakan jenis konflik paling sering ditemui dalam isu lingkungan pada level internasional di mana persetujuan lingkungan hidup yang dinegosiasikan sering kali tertunda. Biasanya terdapat ideologi politik mendasar yang menyebabkan konflik ini terjadi. Menyelesaikan konflik tersebut membutuhkan upaya untuk menegosiasikan nilai uang dan nilai non-uang yang diasosiasikan dengan sistem natural serta level risiko atau nilai 'asuransi' yang kita berikan kepada suatu potensi kejadian masalah lingkungan hidup.

Pembangunan infrastruktur energi, jalan, sarana bisnis merupakan komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam level lokal akan tetapi, isu lokal ini dapat juga beroperasi pada level internasional meskipun suatu perjanjian mungkin menentukan batasan-batasan terhadap pengembangan tersebut demi proteksi lingkungan. Kebanyakan perjanjian biasanya masuk dalam kategori tersebut. Konvensi Kerangka Kerja PBB Terhadap Perubahan Iklim (UNFCCC) sendiri contohnya, merupakan upaya tentang bagaimana perkembangan ekonomi

²³ UN.org. "Climate Change Around the World: A View from the UN Regional Commissions", <https://www.un.org/en/chronicle/article/climate-change-around-world-view-un-regional-commissions> (diakses pada 28 Februari 2023)

harus secara kualitatif dibatasi terutama dalam aspek penggunaan energi dan penggunaan lahan sebagai upaya untuk menghindari efek jangka panjang yang terjadi. Upaya diplomasi mengenai Konvensi Kerangka Kerja PBB Terhadap Perubahan Iklim juga termasuk negosiasi asuransi risiko karena hal tersebut menyangkut terhadap berbagai dampak skenario berbeda serta kemampuan suatu negara dalam menghadapi perubahan iklim.

Penggunaan liberalisme institusional dalam tulisan ini adalah sebagai dasar analisis upaya mitigasi perubahan iklim internasional karena kerangka kerja aksi perubahan iklim telah sejak awal dibentuk dengan kesadaran bahwa perubahan iklim merupakan masalah global yang akan dialami oleh semua negara-negara di muka Bumi. Melalui pemahaman ini juga, UNFCCC atau Kerangka Kerja PBB dalam Penanganan Perubahan Iklim dibentuk dengan tujuan untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca. Dokumen PBB mengenai perubahan iklim ditandatangani oleh 154 negara di Rio de Janeiro 1992 yang membuktikan bahwa anggota PBB sanggup untuk berkooperasi dalam mengatasi masalah perubahan iklim.²⁴ Jika Teori Politik Hijau merupakan dasar konsep tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya preservasi lingkungan hidup, liberalisme institusional memberikan wadah di mana ide-ide terkait kelestarian lingkungan hidup dapat dibahas dan selanjutnya memberikan fasilitas untuk implementasi dari persetujuan yang dicapai.

Liberalisme institusional diaplikasikan sebagai wadah yang membelakangi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Maroko dalam upaya mitigasi

²⁴ UNRIC, What Happened in Rio 1992, <https://www.unric.org/en/rio20/27615-back-in-time-what-was-rio-1992>, (diakses pada diakses 28 Februari 2023)

perubahan iklim. Meski aksi-aksi yang diterapkan adalah tindakan yang terjadi dalam level nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa aksi tersebut merupakan langkah yang diambil seiring dengan ratifikasi Maroko atas Persetujuan Paris and Protokol Kyoto di UNFCCC. Dalam kata lainnya, aksi mitigasi perubahan iklim dilakukan secara nasional oleh masing-masing negara dengan persetujuan yang dilakukan secara internasional dalam wadah institusi liberal yang ada. Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya mitigasi perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama bagi negara-negara yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu, meski aksi yang dilakukan adalah aksi nasional, dampak dari aksi tersebut merupakan dampak yang akan menambah kemungkinan penanganan perubahan iklim dalam level internasional.

Melalui liberalisme institusional, mitigasi perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama negara-negara anggota UNFCCC dan semua pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi bagian dari persetujuan tersebut. Optimalisasi tujuan mitigasi perubahan iklim merupakan hal yang krusial bagi kesuksesan penanganan perubahan iklim.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan semakin kompleksnya kondisi hubungan internasional, kondisi institusional liberalisme menjadi bagian penting dalam aplikasi Teori Politik Hijau yang terjadi secara nyata terutama bagi aktor-aktor negara yang nantinya akan mendelegasikan kebijakan-kebijakan terkait kepada aktor-aktor non negara. Maroko sebagai negara anggota UNFCCC selanjutnya merupakan anggota dari institusi liberal yang menggunakan prinsip-prinsip mendasar dari teori politik hijau untuk

mencapai tujuan yang ditentukan oleh Persetujuan Paris untuk menahan pemanasan global dalam level 1.5C. *Green Theory* adalah dasar utamanya, akan tetapi liberalisme insitusional memberikan wadah di mana kerjasama-kerjasama yang mungkin dilakukan oleh Kerajaan Maroko dengan negara-negara maju melalui transfer teknologi ramah lingkungan serta koordinasi dengan negara-negara berkembang untuk mengikuti langkah mitigasi masing-masing negara demi menegosiasikan transisi ke ekonomi yang ramah lingkungan. Teori Politik Hijau memberikan langkah-langkah, petunjuk, kritik serta tujuan yang ingin dicapai sementara Liberalisme Institusional merupakan sarana yang membantu negara-negara untuk mencapai tujuan.

2.2 Review Konsep

2.2.1 Keseimbangan Lingkungan Hidup

Konsep keseimbangan lingkungan hidup dikembangkan sebagai ide-ide yang mencoba untuk menyatukan seluruh umat manusia dalam pemahaman terkait lingkungan serta rencana jangka panjang yang digunakan untuk mengatur sumber daya yang ada di dalamnya. Topik keseimbangan lingkungan menjadi bagian penting di Konferensi PBB terkait Lingkungan Manusia yang diadakan di Stockholm, Swedia pada Juni 1972.

Keseimbangan Lingkungan Hidup adalah sistem analisis yang berkaitan dan berinteraksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan di Bumi. Melalui konsep ini sistem ekologi dianggap perlu menemukan titik *equilibrium* stabil di mana ketika sistem tersebut diganggu atau diubah, proses koreksi melalui

timbal balik negatif akan terjadi untuk mengembalikan kondisi kepada titik seimbang pada awalnya. Konsep ini seringkali digambarkan sebagai keseimbangan yang lemah dan perlu diperhatikan dengan baik.²⁵

Melalui konsep keseimbangan lingkungan hidup, interaksi antara aktivitas manusia dan pengaruhnya terkait sistem ekologi Bumi dapat diamati. Pemahaman keseimbangan lingkungan hidup dan perlunya menjaga kondisi tersebut untuk terus berada di titik *equilibrium* merupakan konsep mendasar yang menjadi bagian penting dari gerakan lingkungan hidup. Konsep ini menjadi tema utama di buku *Silent Spring* oleh Rachel Carson.

2.2.2 Perubahan Iklim

Anthropogenic berasal dari dua kata dalam bahasa latin yaitu, *anthropose* yang berarti manusia dan *genic* yang berarti disebabkan. Perubahan iklim *anthropogenic* adalah perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Berdasarkan laporan yang dibentuk oleh IPCC—atau *Intergovernmental Panel on Climate*—perubahan iklim adalah perubahan terhadap kondisi iklim yang dapat diidentifikasi (contohnya dengan menggunakan test statistik). Sesuai dengan pemahaman terkait pentingnya keseimbangan lingkungan hidup, perubahan tersebut diatribusikan kepada kegiatan manusia – baik secara langsung maupun tidak langsung— yang mengubah komposisi atmosfer secara global.²⁶

Perubahan suhu permukaan bumi merupakan efek yang terjadi karena perubahan komposisi kimia atmosfer. Berdasarkan data yang disediakan oleh

²⁵ Kricher, John (2009). *The Balance of Nature: Ecology's Enduring Myth*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. .

²⁶ IPCC, "Glossary", diakses pada 28 Februari 2023. <https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/>

NASA Goddard *Institute for Space Studies*, suhu rata-rata bumi terus meningkat hingga 0.8 celcius sejak 1880. Dua pertiga dari pemanasan tersebut atau sekitar 0.6 celcius terjadi dalam tiga dekade terakhir sejak 1975.²⁷ Adapun emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan tersebut adalah; karbon dioksida dari bahan bakar fosil, karbon dioksida dari penggundulan hutan dan pembusukan bio mass, metana, nitrous oxide, dan gas-gas berbasis flourin lainnya.

Dengan perubahan komposisi kimia pada atmosfer, naiknya rata-rata suhu permukaan bumi, perubahan iklim yang dipengaruhi oleh hal-hal tersebut tidak dapat terelakan. Hal ini berarti perubahan iklim yang menyebabkan perubahan di pola badai, frekuensi kekeringan, frekuensi banjir bandang, kenaikan permukaan laut, atau perubahan kimia yang terjadi pada laut yang membahayakan manusia.

Pada 1992, PBB membangun Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (UNFCCC) yang objektif utamanya adalah untuk menstabilkan konsentrasi gas efek rumah kaca pada atmosfer untuk mencapai “level yang akan mencegah intervensi anthropogenic berbahaya pada sistem iklim bumi.” UNFCCC merupakan langkah historis yang diambil oleh masyarakat internasional dalam upaya mereka untuk melakukan mitigasi isu perubahan iklim. Sama seperti kegiatan negosiasi lainnya, salah satu aspek penting dari proses ini adalah diplomasi.

²⁷ NASA, “World of Change: Global Temperatures”, <https://earthobservatory.nasa.gov/world-ofchange/DecadalTemp> (diakses pada 28 Februari 2023)

2.3 Review Studi Sebelumnya

Berkaitan dengan topik yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka perlu didukung dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang sejenis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian sebagai *benchmark* penelitian:

1) “*Enhancing the effectiveness of national and regional institutions in addressing climate change in the MENA Region: Lessons from Morocco and the Maghreb*” oleh Riyad Fakhri, Laila Dalaa, dan Saad Belkasmi yang dikeluarkan pada 2021. Penelitian ini berfokus terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Maroko untuk mengkoordinasikan usaha regional dalam mitigasi perubahan iklim. Di sini, ditekankan bahwa untuk mendukung koordinasi dan efisiensi, kerangka kerja legal untuk membentuk berbagai departemen, kementerian, dan agensi dalam perubahan iklim perlu di klarifikasikan dan diperkuat. Meski beberapa upaya telah dilakukan oleh negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah, penanganan perubahan iklim dalam level regional masih sulit untuk dicapai, sama seperti di wilayah regional di belahan dunia lainnya. Maroko terus menjadi bagian dari dinamika yang mencoba untuk menyediakan solusi ke berbagai isu berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim.

Seperti yang disampaikan dalam teori liberalisme institusional, kooperasi baik dalam level internasional maupun regional merupakan hal yang sangat penting dalam mitigasi isu perubahan iklim. Melalui kooperasi regional, tanggung jawab masing-masing negara anggota dapat di regulasi melalui kebijakan, aturan, standar, prosedur dan mekanisme yang disetujui. Relevansi penelitian ini

membahas terkait kerangka kerja yang digunakan untuk memastikan koordinasi institusi yang lebih baik dengan fungsi untuk pengawasan lingkungan hidup.

Tulisan ini terfokus kepada upaya koordinasi yang dilakukan oleh Maroko dalam lingkup regional. Meski upaya regional ini merupakan bagian penting, koordinasi regional merupakan salah satu dimensi upaya mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini akan juga membahas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Maroko secara nasional untuk mitigasi perubahan iklim. Selibhnya, penemuan tersebut dapat digunakan sebagai model yang bisa diadaptasi oleh negara-negara berkembang lainnya demi mencapai tanggung jawab mereka dalam UNFCCC.

2) Penelitian selanjutnya adalah *Cascading Climate Effects in the Middle East and North Africa: Adapting Through Inclusive Governance* oleh Frederic Wehrey dan Ninar Fawal untuk *Carnegie Endowment for International Peace* pada 2022. Penelitian ini membahas terkait dampak-dampak perubahan iklim yang akan mempengaruhi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara dan bagaimana hal tersebut akan memperparah masalah-masalah pemerintahan sekitar serta mempertajam ketimpangan ekonomi dan pada saat bersamaan membuat masalah dan disrupti baru untuk pemerintahan sekitar. Sebagai negara-negara yang saat ini sudah mencoba untuk menekan masalah yang disebabkan oleh pandemi, perang saudara, ketimpangan sosial yang disebabkan oleh konflik tersebut, dan berkurangnya permintaan global terhadap minyak yang merupakan sumberdaya utama yang bergantung terhadap perkembangan ekonomi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara dampak perubahan iklim akan menambah beban yang besar terkait masalah-masalah yang harus terus diatasi.

Penelitian ini memberikan gambaran terhadap risiko-risiko dari dampak perubahan iklim dan implikasinya terhadap pemerintahan Timur Tengah dan Afrika Utara dan langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk mitigasi pemanasan global melalui transisi ke energi terbarukan dan teknologi hijau. Masalah perubahan iklim merupakan masalah yang melintasi batasan-batasan nasional, memahami kondisi dan profil geografis negara Maroko merupakan bagian penting dari pemahaman langkah-langkah implementasi teknologi untuk mitigasi perubahan iklim.

Penelitian ini terfokus kepada dampak dari perubahan iklim yang akan membesar dan meluas tanpa tindakan mitigasi dari pemerintah Timur Tengah dan Afrika Utara. Penelitian ini membahas terkait adaptasi-adaptasi yang perlu dilakukan dalam sistem pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang akan timbul dengan perubahan iklim. Adaptasi merupakan bagian penting lainnya dalam aksi perubahan iklim, selain upaya mitigasi, adaptasi yang sesuai dapat memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang akan tertimpa masalah yang disebabkan oleh pemanasan global. Meski hampir serupa dan juga memiliki saran komprehensif terkait pemerintahan Maroko terkait adaptasi perubahan iklim, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah terkait dalam upaya-upaya mitigasi dalam perubahan iklim di Maroko.

3) Penelitian selanjutnya adalah *Climate Change Impacts in the Maghreb Region: Status and Prospects of the Water Resources* oleh L. OUalkacha, L. Stour, A. Agoumi, & A. Kettab yang dikeluarkan pada 2017. Di mana pembahasan terkait rentannya wilayah Maghreb karena perubahan iklim

salah satunya akan menyebabkan kekurangan cadangan sumber daya air untuk menghadapi kondisi perubahan iklim. Penelitian ini membahas perkembangan-perkembangan rencana yang membahas perubahan iklim dan adopsi terkait perkembangan berkelanjutan yang membuka kesempatan untuk peningkatan dan proteksi sumber daya natural. Dalam penelitian ini, pembahasan terkait dampak perubahan iklim terhadap sektor air yang ada di wilayah Maghreb sebagai dasar untuk meningkatkan kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi iklim dan perkembangan rencana pengaturan sumberdaya di wilayah tersebut.

Penelitian ini menjadi pembahasan terkait peningkatan signifikan relevansi perkembangan kebijakan terkait regulasi air, mengingat perkembangan mayoritas negara-negara Maghreb sangat erat dengan sumberdaya air dan berkontribusi secara kuat terhadap keseimbangan sosioekonomi dan GDP. Negara-negara Maghreb telah mencoba untuk menghadapi kekurangan sumber daya air dengan meningkatkan kebijakan air dan strategi, perkembangan infrastruktur, ekonomi dalam penggunaan air, pengelolaan air yang telah dipakai.

Masalah terkait manajemen sumberdaya yang akan semakin berkurang dikarenakan ketidakstabilan kondisi iklim merupakan bagian yang penting untuk memperkuat suatu negara dan kawasan dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini menjadi bagian penting yang harus diikutsertakan dalam rencana nasional Maroko untuk membangun keberlangsungan ekonomi dan keberlanjutan negara. Jika penelitian tersebut terfokus terhadap manajemen sumberdaya air, penelitian ini membahas mengenai transisi terhadap teknologi ramah lingkungan terkait dengan sumber daya energi yang hijau.

4) Penelitian selanjutnya adalah *Preserving the Environment and Establishing Sustainable Development: An Overview on the Moroccan Model* oleh AbdelKarim Guaadaoui, Meryem ElYadini, dan Khalid Chiat, Trik Jdaini, Souad El Hajjaji yang dikeluarkan di 2021. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana Maroko telah berhasil mengembangkan visi politis dan strategis yang secara perlahan telah digunakan sebagai dasar untuk perkembangan kebijakan public lainnya. Langkah selanjutnya adalah untuk membuat lingkungan hidup sebagai pijakan dasar perkembangan berkelanjutan yang nantinya akan membentuk ekonomi yang “hijau dan inklusif”.

Penelitian ini adalah literatur penting yang membahas bagaimana Maroko telah menempatkan kebijakan lingkungan hidup dan keberlangsungannya sebagai beberapa area prioritas, terutama dalam memperkuat kerangka insitutusional dan legal di mana upaya perbaikan lingkungan dilakukan melalui program-program yang didedikasikan untuk menjaga lingkungan dan memberikan instrument finansial dan sistem untuk monitoring lingkungan. Manuskrip ini membentuk model Maroko dalam upayanya untuk menjaga lingkungan hidup dan mengembangkan generasi kedua dari perkembangan berkelanjutan.

Penelitian ini lebih terfokus kepada perkembangan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang diambil oleh Maroko secara keseluruhan. Meski beririsan, kebijakan preservasi dalam lingkungan hidup akan berbeda dengan kebijakan yang digunakan untuk mitigasi perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan penelitian objek utama penelitian adalah kebijakan publik terkait manajemen pembuangan dan sampah untuk meningkatkan kualitas udara dalam

berbagai sektor aktivitas polutif melalui kerangka kerja Program Udara Nasional. Dalam penelitian yang akan dilakukan di tulisan ini, penulis akan terfokus terhadap langkah-langkah dan rencana yang diambil oleh pemerintah Maroko dalam upaya mitigasi perubahan iklim seperti transisi ke energi terbarui melalui instalasi panel surya.

5) Penelitian terakhir yang digunakan adalah *Climate Change Governance in the Anthropocene: Emergence of Polycentrism in Chile* oleh Rodrigo A. Arriagada, Paulina Aldunce, Gustavo Blanco, dan Cecilia Ibarra yang dikeluarkan di 2018 yang membahas terkait mitigasi perubahan iklim sebagai upaya multilateral yang dapat dilaksanakan dalam level lokal dan global. Studi kasus yang digunakan adalah INDC atau *Nationally Determined Contribution on Climate Change* dan Rencana Aksi Perubahan Iklim Nasional Chile yang menelaah bagaimana pemerintah Chile telah mulai menargetkan sumberdaya finansial yang dibutuhkan dalam perkembangan mitigasi perubahan iklim. Melalui penelitian ini, perkembangan terkait upaya-upaya mitigasi perubahan iklim di Chile dibahas baik dalam pembentukan institusi dan respons perubahan iklim teknis.

Penelitian terakhir merupakan pembandingan terhadap perkembangan upaya mitigasi perubahan iklim di Maroko. *Climate Change Governance in the Anthropocene: Emergence of Polycentrism in Chile* oleh Rodrigo A. Arriagada, Paulina Aldunce, Gustavo Blanco, dan Cecilia Ibarra membahas terkait upaya-upaya mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah Chile. Sama seperti Maroko, Chile sebagai negara dunia ketiga merupakan negara yang tidak

memiliki beban besar terhadap konsentrasi gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi saat ini. Namun, sama seperti Maroko, Chile juga termasuk negara yang memiliki upaya nasional mitigasi perubahan iklim yang menduduki peringkat ke-6 setelah Maroko dan Norway. Kesamaan level perkembangan ekonomi dan sosial antara Maroko dan Chile, serta kemauan pemerintah negara-negara tersebut dalam mitigasi perubahan iklim menjadi bagian yang penting untuk memahami peranan Maroko dalam upaya Mitigasi perubahan iklim di level internasional.

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dari penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana liberalisme institusional memberikan wadah untuk pengimplementasian teori politik hijau yang tidak hanya merupakan tujuan bersama masyarakat global akan tetapi juga merupakan garis petunjuk yang digunakan oleh Maroko dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut demikian mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Maroko secara nasional. Sebagai negara yang menduduki peringkat ke-empat dalam upaya mitigasi perubahan iklim terbaik di dunia, analisis kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah Maroko terkait transisi terhadap teknologi ramah lingkungan dalam mitigasi perubahan iklim menjadi penting dalam penggunaan lanjutannya bagi negara-negara lainnya. Hal ini terutama terkait klaim yang disampaikan oleh negara Adidaya seperti Amerika Serikat dan Kanada yang menanggap biaya transisi perubahan iklim adalah beban ekonomi yang tidak mungkin tercapai.

Liberalisme institusional bergerak sebagai sarana di mana upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota dapat bernegosiasi untuk

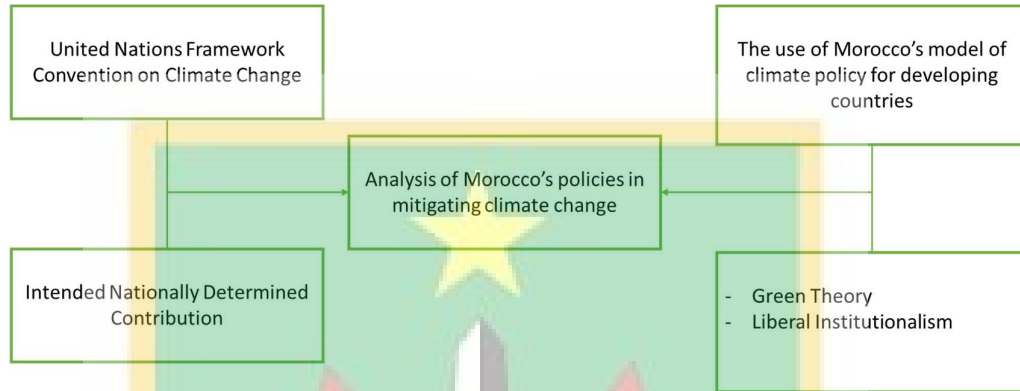
menemukan solusi terbaik mitigasi perubahan iklim. Melalui persetujuan internasional, UNFCCC memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh negara-negara anggota untuk membentuk kebijakan-kebijakan terkait dalam level nasionalnya. Liberalisme institusional adalah sistem timbal balik di mana kebijakan di negosiasikan dalam level internasional dan diimplementasikan dalam level lokal. Dengan konteks berikut, dapat dipahami bahwa aksi-aksi yang diambil oleh Maroko dalam transisinya ke teknologi ramah lingkungan dalam mitigasi perubahan iklim berada dalam ruang lingkup liberalisme institusional yang disediakan oleh UNFCCC.

Pada saat yang bersamaan, Teori Politik Hijau merupakan aspek penting dalam perkembangan kebijakan mitigasi perubahan iklim. Dengan wadah institusi yang diberikan oleh UNFCCC, Praktik Teori Politik Hijau yang dilakukan oleh Maroko pada forum tersebut merupakan bagian utama di mana kepentingan negara diperjuangkan. Hal ini merupakan bagian yang membentuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Maroko. Seperti yang sebelumnya telah disampaikan karena sifat perubahan iklim yang universal, pentingnya kerjasama antara negara-negara anggota juga merupakan bagian penting dari cerita sukses Maroko dalam mitigasi perubahan iklim.

Melalui analisis yang didapatkan dari kebijakan nasional Maroko, negara-negara lainnya mungkin dapat menggunakan model yang digunakan Maroko sebagai dasar pembentukan kebijakan mitigasi perubahan iklim yang tidak hanya menangani isu itu sendiri akan tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonominya.

Berdasarkan analisis di atas maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Bagan 1. Kerangka Konseptual

2.6 Operasional Konsep

Aspek	Dimensi	Parameter
Upaya Maroko dalam Mitigasi Perubahan Iklim	Kebijakan Publik Maroko terkait transisi terhadap teknologi ramah lingkungan dalam Mitigasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Kesuksesan Mitigasi Maroko dalam Mitigasi Perubahan Iklim • Mitigasi Maroko dibandingkan dengan negara-negara anggota UNFCCC lainnya